



APP Gagal Penuhi Kewajiban Melindungi Hutan maupun Restrukturisasi Hutangnya



Laporan Investigasi Eyes on the Forest

Diterbitkan 26 Maret 2012

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau,

Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>

Email: eof@eyesontheforest.or.id

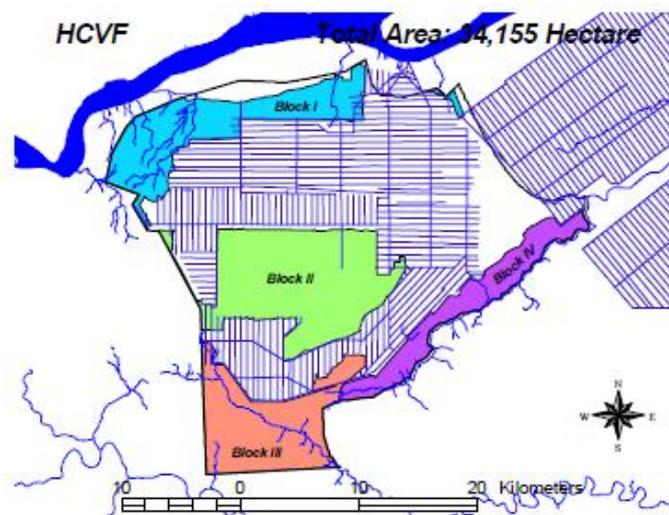
1. APP tandatangani kewajiban melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi guna merestrukturisasi hutangnya sebesar 6 miliar USD

Di awal tahun 2000-an, Asia Pulp & Paper (APP) dari grup Sinar Mas Group menunggak bayar hutang sebesar 13,9 miliar dolar Amerika Serikat (USD) dan karenanya menjadi perusahaan penunggak terbesar di Asia saat itu^{1, 2, 3}.

APP kemudian mulai menegosiasikan Perjanjian Induk Restrukturisasi hutang (Master Restructuring Agreements/MRAs) dengan sebagian krediturnya. Pada Juni 2004, kreditur utama APP – terdiri dari lembaga-lembaga kredit ekspor dari Jerman, Jepang, Perancis, Austria, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol dan Denmark – mengumumkan perjanjian dengan APP dengan memasukkan butir-butir perjanjian lingkungan dalam Perjanjian Induk Restrukturisasi hutang tersebut^{4, 5} sebagai salah satu upaya para kreditur untuk memastikan aspek kelestarian operasi-operasi APP. Koran *The Jakarta Post* menulis: “Apa yang diistilahkan dengan ‘environmental covenants’ atau ‘perjanjian lingkungan’ akan menjadi bagian terpadu dalam Perjanjian Induk Restrukturisasi antara afiliasi-afiliasi APP dan para kreditur.”⁶ APP menulis: “APP sangat menyambut baik kesepakatan ini dan faktanya ini akan menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum.”⁷ Kesepakatan-kesepakatan itu, mencakup 6 miliar dolar AS, sebagai pendanaan yang telah disetujui oleh para kreditur perusahaan utama APP yang beroperasi di Indonesia pada bulan Desember tahun itu⁸.

Pada 2004, APP menugaskan Program SmartWood dari Rainforest Alliance untuk melakukan kajian penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest /HCVF*) pada unit pengelolaan hutan (FMU) APP/Sinar Mas di Pulau Muda berdasarkan “Toolkit HCVF Indonesia”^{9, 10}. Laporan hasil kajian yang dipublikasikan menyatakan: “APP meminta agar kajian ini dilakukan karena dibutuhkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan kepada pelanggan dan lembaga kredit ekspor, sekaligus juga mengacu pada janji APP untuk melindungi hutan kepada krediturnya.”^{11,12}

Unit pengelolaan hutan APP di Pulau Muda mencakup hampir 90.000 hektar dan dioperasikan oleh tiga perusahaan yang dikelola oleh PT. Arara Abadi (AA), salah satu perusahaan milik Sinarmas Forestryⁱ. Kajian tersebut mendelineasi lebih dari 34.000 hektar HCVF dalam unit pengelolaan hutan ini (Peta 1).



ⁱ Unit pengelolaan hutan dikelola oleh PT Arara Abadi dari Sinarmas Forestry berdasarkan tiga lisensi terpisah yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi (AA), PT. Satria Perkasa Agung (SPA) dan satu patungan kolaboratif masyarakat tempatan dikenal dengan nama KTH (*Kemitraan Tanam Hutan*) Sinar Merawang.

Peta 1. *APP berkomitmen melindungi blok I dan blok IV yang diperlihatkan dalam warna-warna biru terang, hijau, pink dan ungu secara berturut-turut yang diidentifikasi oleh SmartWood (Gambar 5 dari laporan pengkajian Pulau Muda, hal. 52).*

Menyusul hasil kajian itu, APP berkomitmen menyisihkan semua blok HCVF yang didelineasi untuk konservasi, dan mengumumkan perusahaannya telah “menetapkan standard baru terhadap cara industri kayu pulp Indonesia mengkaji hutannya sendiri bagi nilai-nilai konservasi.”¹³

Terhadap kajian HCVF oleh Smartwood tahun 2004 tersebut, Deputy CEO APP saat itu mengatakan: “Kami pikir ini merupakan kajian yang sangat profesional. Kami menerima hasil-hasil dan rekomendasi yang diberikan serta telah mulai menyesuaikan operasi-operasi kami dengan hasil kajian tersebut. Laporan ini memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan HTI yang lestari dan pengelolaan wilayah konservasi kami. Kami yakin bahwa pendekatan konservasi yang dilakukan oleh APP berhasil dan kajian ini menunjukkan adanya kemajuan nyata yang terjadi “di lapangan”. “Toolkit HCVF Indonesia” dan aplikasi komersialnya adalah yang pertama bagi industri pulp dan kertas di Indonesia. ... Yang penting adalah kajian SmartWood ini telah memperdalam pemahaman kami tentang nilai-nilai keanekaragaman hayati pada konsesi-konsesi kami dan memberikan kami informasi praktis tentang apa yang harus kami lakukan untuk melindunginya.”¹⁴

1. APP melanggar kewajiban kontrak yang ditandatangani di hadapan hukum kepada para kreditornya

Wakil ketua badan kredit ekspor Jepang menyatakan dalam siaran pers kreditur tahun 2004 soal kesepakatan “perjanjian lingkungan”: “[APP] kini memiliki kesempatan untuk mengambil posisi kepemimpinan yang kuat dalam pengembangan kehutanan yang lestari.” Pada saat yang sama, APP menulis dalam Stakeholder Update: “APP sangat menyambut baik perjanjian ini dan faktanya ini akan menjadi kewajiban kontraktual yang mengikat secara hukum.”¹⁵

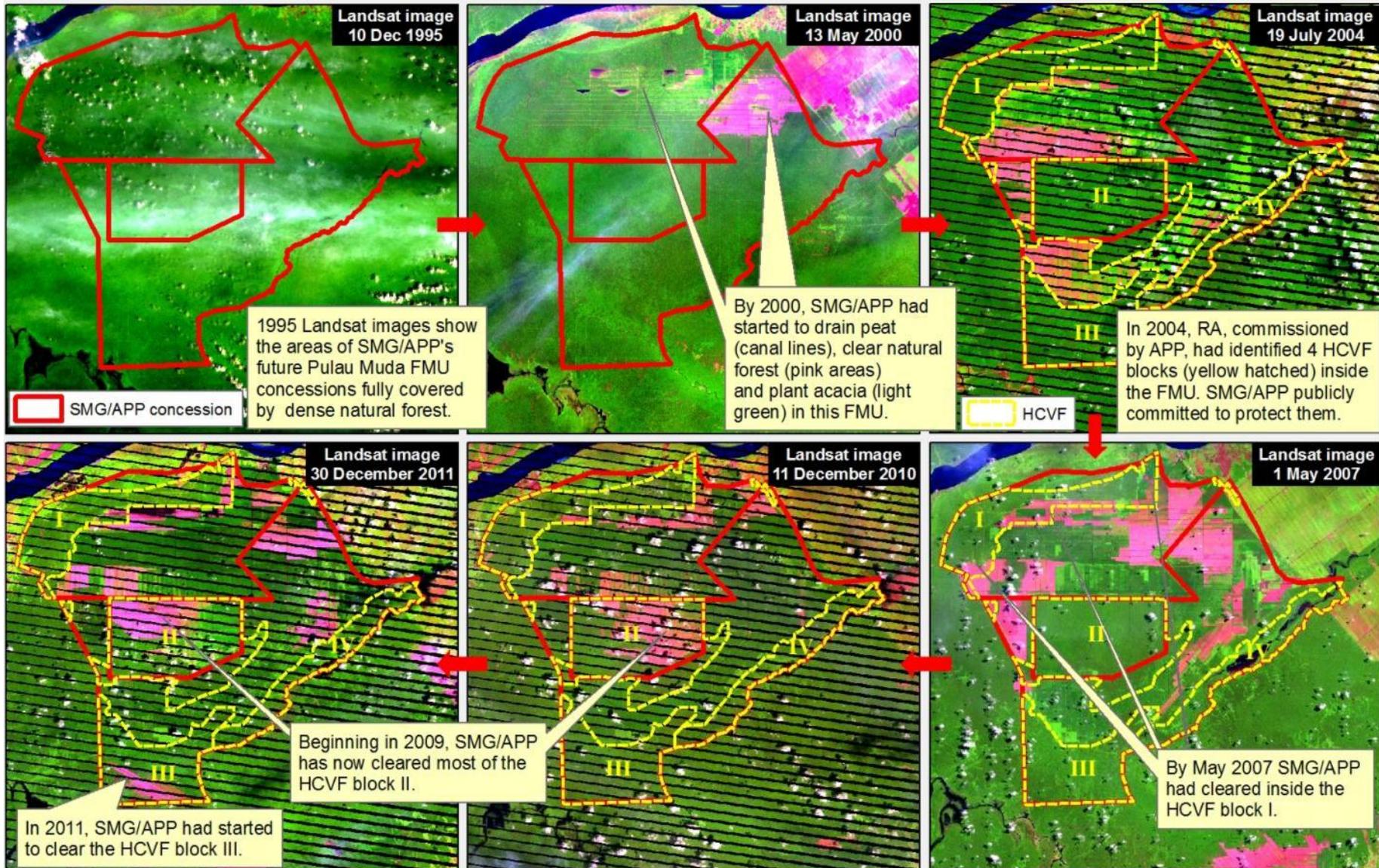
Eyes on the Forest menginvestigasi apakah APP menunaikan kewajiban kontraktual yang mengikat secara hukumnya itu kepada masyarakat finansial. Apakah APP betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk memimpin kegiatan-kegiatan kehutanan yang lestari, termasuk pada produksi pulp dan kertasnya?

Pada Desember 2011, citra satelit menangkap jelas kondisi hutan di unit pengelolaan hutan APP di Pulau Muda. Eyes on the Forest menganalisa citra satelit tersebut, beserta sejarah dari rangkaian citra Landsat untuk mengetahui apakah APP telah memenuhi dua kewajiban utama yang telah disepakatinya dengan kreditur globalnya, yang terkait hal-hal berikut:

1. APP berkomitmen melindungi HCVF seluas 34.000 hektar yang diidentifikasi oleh SmartWood (Peta 1).
2. APP berkomitmen untuk “menerapkan aspek kelestarian (sustainability) pada seluruh kegiatannya” hingga tahun 2007¹⁶. APP mendefinisikan hal ini dalam “Rencana Aksi Kelestarian” tahun 2004: “Perusahaan telah berkomitmen sebelumnya menjadi lestari pada 2007. Ini artinya, setelah waktu yang disepakati tersebut, APP/SMG akan sepenuhnya bergantung pada bahan baku bubuk kertas yang ditanam dari HTI yang lestari dan berasal dari sumber daya dipertanggungjawabkan secara hukum, lingkungan, dan sosial.”¹⁷

Investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest mengungkapkan bahwa:

- APP mulai menebangi HCVF di awal 2007, hanya tiga tahun setelah perusahaan tersebut menandatangani kewajiban yang mengikat secara hukum dan tahun yang sama dimana APP berkomitmen kepada publik untuk "total beroperasi secara lestari". Eyes on the Forest telah melaporkan secara detil tentang sejarah APP yang tak pernah memenuhi komitmen kelestarian mereka¹⁸.
- APP terus menebangi HCVF hingga saat ini, menghancurkan total seluas 12.000 hektar HCVF, sepertiga hutan yang telah mereka janjikan untuk dilindungi kepada kreditur-krediturnya (Peta 2).



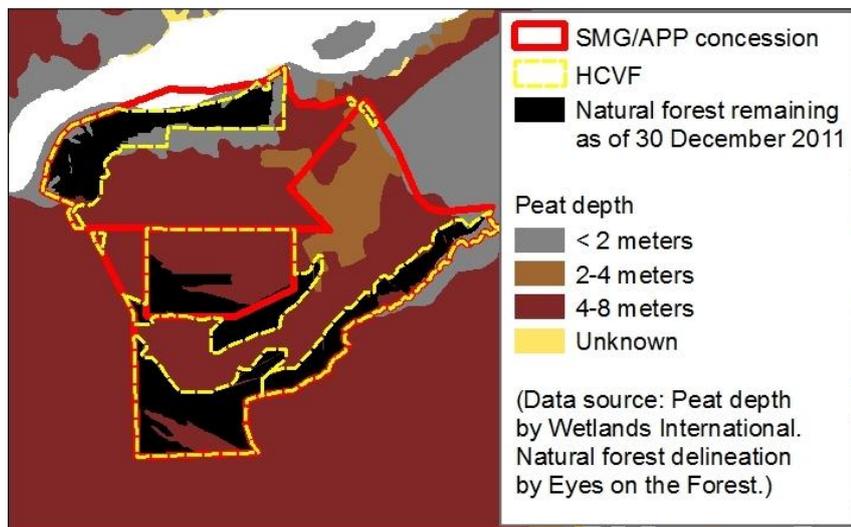
Map 2. Sejarah deforestasi di Pulau Muda hingga 30 Desember 2011. SMG/APP telah menebangi semua hutan alam di luar empat blok HCVF yang APP tandatangani untuk dilindungi (dengan nomor blok seperti pada Peta 1), dan telah menebangi sepertiga hutan di dalam blok-blok HCVF itu, sehingga melanggar kewajiban mengikat secara hukumnya dengan para kreditur.

Selain itu, Eyes on the Forest menemukan APP menebangi hutan alam yang oleh perusahaan dipersiapkan untuk penyisihan bagi area konservasi yang menjadi persyaratan secara hukum. Dalam "Rencana Aksi Kelestarian"-nya ("Sustainability Action Plan") pada tahun 2004¹⁹, APP berkomitmen bahwa hutan di dalam konsesi KTH Sinar Merawang "sudah dalam proses menuju perlindungan tetap" (Peta 3, kiri). Namun citra satelit pada tanggal 30 Desember 2011 menunjukkan bahwa APP justru menebangi sebagian dari hutan ini.



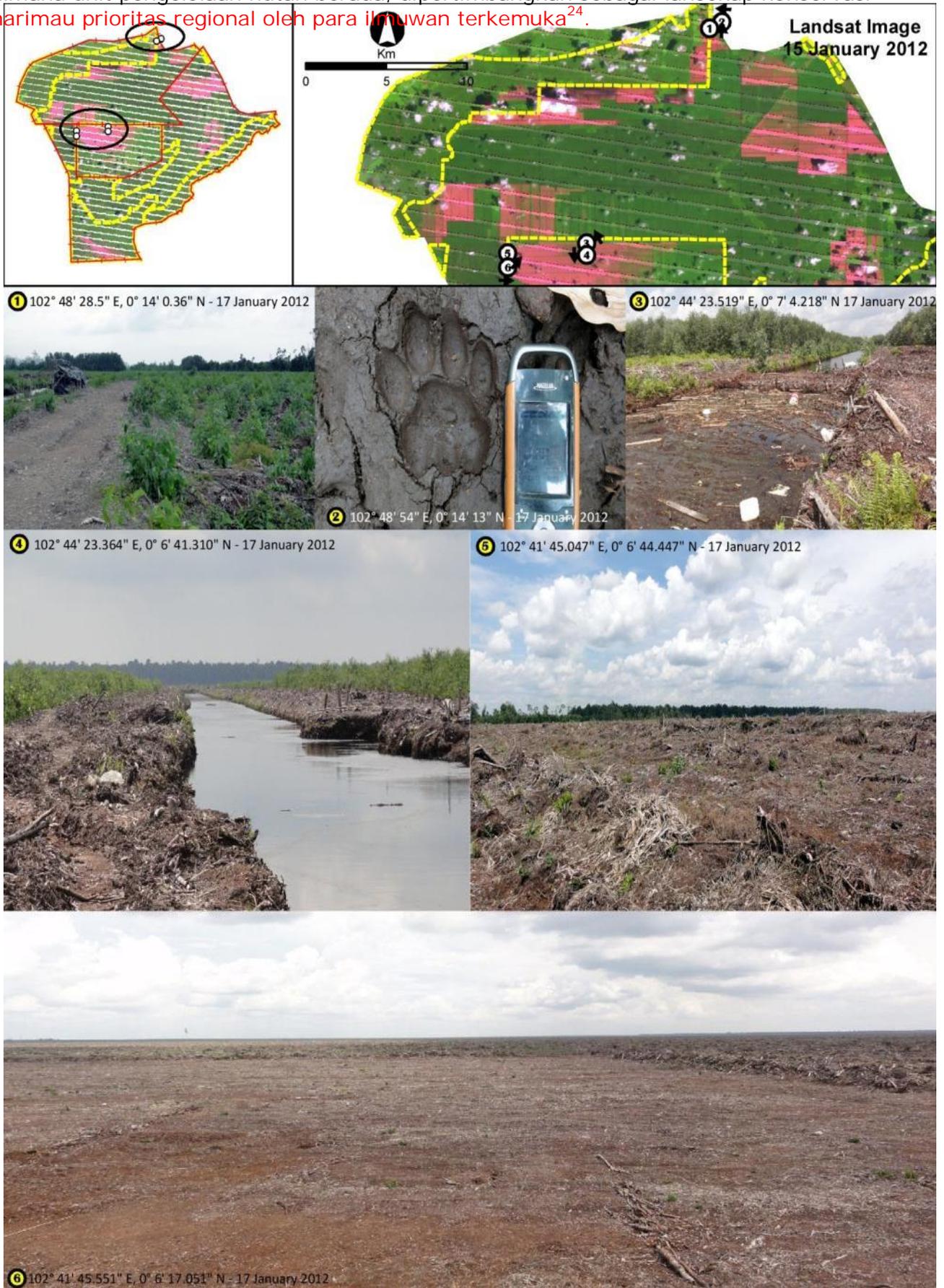
Peta 3. Peta sebelah kiri: Rencana tata ruang yang disetujui untuk konsesi APP di Pulau Muda dengan hutan yang diberikan untuk konservasi dengan hutan yang ditunjukkan dengan warna hijau tua (Gambar 1 dalam laporan penilaian, halaman 10). Peta sebelah kanan: Satu citra satelit tanggal 11 Desember 2010 menunjukkan bahwa hutan di dalam salah satu kawasan yang diberikan untuk konservasi telah dibabat.

Kebanyakan dari deforestasi APP di unit pengelolaan hutan Pulau Muda didahului dengan penggalian gambut lebih dari 4 meter (Peta 4), yang melanggar Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung²⁰, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem²¹, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang²², rencana tata ruang yang masih berlaku yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional²³.



Peta 4. Kedalaman gambut di dan sekitar unit pengelolaan hutan Pulau Muda.

Investigasi EoF pada bulan Januari 2012 menemukan kawasan tebangan dan kanal gambut dalam dan juga jejak kaki harimau Sumatera di kawasan itu (Peta 5). Lansekap Kerumutan, dimana unit pengelolaan hutan berada, dipertimbangkan sebagai lansekap konservasi harimau prioritas regional oleh para ilmuwan terkemuka²⁴.



Peta 5. Foto-foto diambil oleh Eyes on the Forest dalam investigasi Januari 2012. Foto (1): Pohon-pohon akasia berusia sekitar 5 bulan di kawasan dimana sekitar 500 hektar hutan di Blok I HCVF ditebangi pada 2011. Foto (2): Jejak kaki harimau Sumatera yang masih baru ditemukan oleh EoF dalam jarak dekat dengan Foto 1. Foto-foto (3-6): Sekitar 3.000 hektar hutan di Blok II HCVF ditebangi selama 2011. EoF menemukan pohon-pohon akasia muda, juga kanal gambut dibuka yang melepaskan emisi karbon.

2. Rekomendasi Eyes on the Forest

Eyes on the Forest menghimbau Asia Pulp & Paper untuk:

- Berhenti melanggar komitmen publiknya dan kewajiban hukum.
- Berhenti menebangi hutan alam seperti yang dijanjikan kepada kreditur hingga tahun 2007.

Eyes on the Forest menghimbau kreditur perusahaan untuk:

- Meminta APP bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut dan memintanya menunaikan komitmen mengikat secara hukum untuk mencapai operasional yang “sepenuhnya lestari” hingga 2007 dan menghentikan penebangan HCVF di unit pengelolaan hutan (FMU) Pulau Muda.

Eyes on the Forest menghimbau pelanggan, investor dan mitra bisnis APP lainnya untuk:

- Menolak klaim yang dibuat oleh *PR Agency* atau humas perusahaan tsb^{25, 26, 27} dan bergabung dengan daftar perusahaan bertanggungjawab yang telah menghentikan bisnis dengan APP untuk tidak membeli produk mereka dan tidak mendanai operasi pengambilan kayu dan ekspansi serta pembangunan pabrik-pabrik pengolahan pulp dan kertas yang baru.

SELESAI

Untuk informasi selanjutnya, sila kontak:

Eyes on the Forest Editor

Afdhal Mahyuddin

Email: eof@eyesontheforest.or.id

Referensi

¹ McBeth, J. (2002) Missing the Wood for the Trees. Far Eastern Economic Review 11 April 2002 issue.

² Setiono, B. (2007) Debt Settlement of Indonesia Forestry Companies. Assessing the Role of Banking and Financial Policies for Promoting Sustainable Forest Management in Indonesia. CIFOR report.
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BSetiono0701.pdf

³ Profundo (24 October 2005) The financing of the Riau pulp producers Indah Kiat and RAPP. Draft, a research paper prepared for Jikalahari (Indonesia).
http://www.jikalahari.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16&Itemid=139&lang=id

⁴ The Jakarta Post (4 June 2004) APP reaches agreement with major creditors.

<http://www.thejakartapost.com/news/2004/06/04/app-reaches-agreement-major-creditors.html>

⁵ Asia Pulp & Paper (June 2004) Stakeholder Update 03/04.

⁶ The Jakarta Post (4 June 2004)

⁷ Asia Pulp & Paper (June 2004)

⁸ The Wall Street Journal (7 December 2004) Asia Pulp & Paper Wins a Debt Restructuring. Creditors Approve Program Covering About \$& Billion; Some U.S. Leaders Balk.

- ⁹ Asia Pulp & Paper (12 October 2004) New conservation assessment shines light on Sumatra's rainforests.
- ¹⁰ Rainforest Alliance & Proforest (August 2003) Identifying, Managing, and Monitoring High Conservation Value Forests in Indonesia: A Toolkit for Forest Managers and other Stakeholders. Version 1. <http://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/hcvf-toolkit-for-indonesia-english.pdf>
- ¹¹ Rainforest Alliance SmartWood Program (1 October 2004) High Conservation value Forest (HCVF) Assessment Report for: Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group (Pulau Muda District). http://eyesontheforest.or.id/attach/HCVFKerumutanAPP_SmartWood10Oct04.pdf
- ¹² See also Asia Pulp & Paper (12 October 2004) New conservation assessment shines light on Sumatra's rainforests.
- ¹³ Asia Pulp & Paper (12 October 2004)
- ¹⁴ Asia Pulp & Paper (12 October 2004) New conservation assessment shines light on Sumatra's rainforests.
- ¹⁵ Asia Pulp & Paper (June 2004)
- ¹⁶ Asia Pulp & Paper (June 2004)
- ¹⁷ Asia Pulp & Paper (February 2004) Sustainability Action Plan.
- ¹⁸ Eyes on the Forest (14 December 2011a) Press Release: Report reveals facts behind APP's conservation claims. Eyes on the Forest investigation finds Asia Pulp & Paper pulping the tiger sanctuary it helped create. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=506> Eyes on the Forest (14 December 2011b) The truth behind APP's greenwash. [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20\(14Dec11\)%20The%20truth%20behind%20APPs%20greenwash%20HR.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20(14Dec11)%20The%20truth%20behind%20APPs%20greenwash%20HR.pdf)
- ¹⁹ Asia Pulp & Paper (February 2004)
- ²⁰ Presidential Decree No. 32 of 1990 Concerning Protection Area Management. <http://www.scribd.com/doc/38292787/Keppres-No-32-Tahun-1990-Tentang-Pengelolaan-Kawasan-Lindung>
- ²¹ Act of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins3867.pdf>
- ²² Law (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2007 http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf
- ²³ Government Regulation (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2008 http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_26_Tahun_2008.pdf
- ²⁴ Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf and E. Wikramanayake. 2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. The Technical Assessment. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF, New York – Washington, D.C http://www.catsg.org/catsgportal/bulletin-board/04_reports/pdf/Sanderson_et_al_2006_Tiger_recovery_technical_assessment.pdf
- ²⁵ Eyes on the Forest (14 December 2011a) Eyes on the Forest (14 December 2011b)
- ²⁶ Eyes on the Forest (16 December 2011) APP's amazing shrinking "contribution" to tiger sanctuary. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=507>
- ²⁷ WWF International (16 December 2011) Document pulps APP's tiger sanctuary claims. http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/wwf_offices_asia.cfm?202873/Documents-pulp-APPs-tiger-sanctuary-claims